

# NEWSLETTER

Dapatkan newsletter ini di: [www.idscore.id](http://www.idscore.id)



Pembaca yang kami hormati,

**H**arapan akan pulihnya kondisi perekonomian semakin kuat dengan dimulainya program vaksinasi massal yang diinisiasi pemerintah. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksin pada 13 Januari 2021 dan kemudian diikuti oleh tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, orang lanjut usia (lansia) serta masyarakat umum.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 181,5 juta jiwa atau 70% dari populasi Indonesia, yang diharapkan dapat rampung pada akhir tahun 2021. Angka ini ditetapkan untuk mencapai *herd immunity* yang diproyeksi dapat terbentuk pada Maret 2022.

Dimulainya program vaksinasi menimbulkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan berkisar antara 4,5% - 5,5%. Angka ini jauh melesat dibanding realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi 2,07%. Sementara pada kuartal I 2021, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada direntang 1,6% - 2,1%. Hal ini diyakini karena adanya peningkatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah.

Berdasarkan survei permintaan dan penawaran pembiayaan perbankan Bank Indonesia periode Januari 2021 terindikasi kebutuhan pembiayaan korporasi meningkat pada 3 bulan ke depan, terutama untuk mendukung aktivitas operasional. Ini terlihat dari

## MENYAMBUT TERANG MENGGAJAI HARAPAN

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kebutuhan pembiayaan korporasi 3 bulan mendatang yang sebesar 27,1%.

Peningkatan kebutuhan pembiayaan terutama terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, perikanan dan kesehatan, informasi dan komunikasi serta real estate. Kebutuhan pembiayaan korporasi tersebut sebagian direncanakan menggunakan dana sendiri (laba ditahan) serta sebagian lainnya dari kredit bank.

Dari sisi penawaran perbankan, penyaluran kredit baru terindikasi meningkat pada triwulan I-2021, tercermin pada SBT, perkiraan penyaluran kredit baru sebesar 67,4%. Sedangkan berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan secara triwulanan diperkirakan terjadi pada seluruh kategori bank dan untuk seluruh jenis kredit.

Bank Indonesia sendiri telah menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate atau suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,50% pada Februari 2021. Keputusan ini diambil sebagai langkah lanjutan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional, yang diikuti pula dengan langkah-langkah lanjutan, seperti melonggarkan ketentuan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0%, dan melonggarkan rasio loan to value atau financing to value (LTV/FTV) kredit atau pembiayaan

properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti bagi bank yang memenuhi ketentuan non performing loan atau non performing financing (NPL/NPF) tertentu. Bank Indonesia juga telah menginjeksi likuiditas atau quantitative easing ke perbankan sebesar Rp759,31 triliun sejak tahun 2020 hingga Februari 2021 atau setara 4,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Langkah ini dilakukan demi menggenjot penyaluran kredit yang ditargetkan bisa mengalami kenaikan 5% - 7% pada tahun ini.

Pemerintah juga mengeluarkan relaksasi insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0% untuk beberapa jenis mobil baru hingga akhir 2021 ini dengan tarif yang turun berjenjang selama tiga bulanan.

Progres kemajuan program vaksinasi yang diiringi dengan program jaminan keamanan sosial dan berbagai langkah strategis yang diambil tersebut diharapkan mampu memulihkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan kredit.

Survei Konsumen Bank Indonesia Maret 2021 juga mengindikasikan berlanjutnya perbaikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2021 sebesar 93,4, meningkat dibandingkan dengan 85,8 dan 84,9 pada bulan Februari dan Januari 2021. Perkembangan program vaksinasi yang berjalan lancar mendorong perbaikan keyakinan terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi ke depan dan persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Pada edisi kali ini kita akan mengulas tentang peluang peningkatan konsumsi domestik melalui program keringanan uang muka kredit kendaraan bermotor dan properti, potensi keberadaan bank digital dan dampak positifnya serta profil risiko lembaga keuangan yang masih terjaga. Selain itu, kami juga menyajikan beberapa informasi kilas kegiatan kami beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan ucapan selamat memasuki bulan suci Ramadhan, semoga rangkaian ibadah yang dilakukan dapat berjalan lancar dan selalu memperoleh berkah Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.

Salam Kami,

Yohanes Arts Abimanyu  
Direktur Utama

## SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA TETAP TERJAGA

Sektor jasa keuangan Indonesia masih tetap terjaga meskipun pandemi masih melanda. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat di tengah moderasi kinerja intermediasi, profil risiko lembaga jasa keuangan pada Januari 2021 masih aman.

Rapat Dewan Komisiner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan menilai sampai dengan data Januari 2021, stabilitas sistem keuangan masih terjaga. OJK juga telah mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor jasa keuangan.

Relaksasi kebijakan prudensial sektor jasa keuangan secara temporer ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit yang lebih cepat dengan mempertimbangkan adanya unsur idiosyncratic pada sektor jasa keuangan. Menurut OJK, rasio non performing loan (NPL) gross perbankan tercatat sebesar 3,17% dengan NPL net di level 1,03%. Adapun rasio NPF Perusahaan Pembiayaan sebesar

3,9%. Risiko nilai tukar perbankan masih terjaga pada level yang rendah terlihat dari rasio Posisi Devisa Neto (PDN) Januari 2021 sebesar 1,73%, jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20%.

Lebih lanjut, likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Terlihat dari rasio alat likuid atau non-core deposit dan alat likuid/DPK per 17 Februari 2021 terpantau pada level 157,14% dan 33,85%, di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Permodalan lembaga jasa keuangan sampai saat ini relatif terjaga pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio perbankan tercatat sebesar 24,50% serta Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 535% dan 329%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%. Begitupun gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,11%, jauh di bawah maksimum 10%.

Di sisi lain, OJK memandang perekonomian sejumlah negara yang masih berkontraksi sepanjang tahun 2020 masih berimbas pada perekonomian Indonesia. Namun demikian, outlook ke depan diperkirakan membaik seiring penurunan laju infeksi harian secara global dan vaksinasi yang semakin luas. Hal itu sejalan dengan kebijakan fiskal dan moneter akomodatif yang terus dijalankan berbagai negara untuk mendukung pemulihan ekonomi. IMF memperkirakan perekonomian global tahun 2021 akan pulih lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

Perkembangan positif tersebut mendorong pasar keuangan global termasuk Indonesia menguat di bulan Februari 2021. Sampai dengan 19 Februari 2020, IHSG menguat sebesar 6,3% month to date (mtd). Namun demikian, pasar SBN sedikit tertekan dengan rerata yield SBN naik sebesar 9,4 bps mtd. Dari sektor perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) di bulan

Januari 2021 tumbuh *double digit* sebesar 10,57% year on year (yoy). Sementara itu, walau kredit perbankan berkontraksi -1,92% yoy namun tren pertumbuhannya mengindikasikan perbaikan dari bulan sebelumnya, terutama didorong oleh bank BUMN dan BPD yang tumbuh masing-masing 1,45% dan 5,68% yoy.

Di industri keuangan non-bank, piutang perusahaan pembiayaan berkontraksi sebesar -18,6% yoy, terutama disebabkan oleh sektor rumah tangga seiring dengan masih rendahnya permintaan. Sementara itu, premi asuransi yang dihimpun industri asuransi tercatat naik tinggi sebesar Rp 30,4 triliun (Asuransi Jiwa: Rp 19,1 triliun; Asuransi Umum dan Reasuransi: Rp 11,3 triliun) dan fintech P2P Lending November 2020 mencatatkan outstanding pembiayaan sebesar Rp 15,34 triliun atau tumbuh sebesar 13,5% yoy.

Hingga 23 Februari 2021, jumlah penawaran umum yang dilakukan emiten di pasar modal mencapai 16, dengan total nilai penghimpunan dana mencapai Rp 11,01 triliun. Dari jumlah penawaran umum tersebut, empat di antaranya dilakukan oleh emiten baru. Dalam pipeline saat ini terdapat 67 emiten yang akan melakukan penawaran umum dengan total indikasi penawaran sebesar Rp 22,55 triliun.

## BERDAMPAK POSITIF, BANK DIGITAL MAKIN DILIRIK

Lembaga keuangan besar nasional mulai melirik model bisnis bank digital. Besarnya potensi pasar layanan keuangan digital didalam negeri menjadi alasan utama ketertarikan mereka. Berdasarkan kajian Google, Temasek dan Bain pada tahun lalu, nilai dari layanan keuangan digital di Asia Tenggara diproyeksi US\$ 38 miliar sampai US\$ 60 miliar (Rp 554,2 triliun-Rp 875 triliun) per tahun pada 2025.

Terlebih lagi, Indonesia yang merupakan negara berpenduduk terbesar di kawasan ini, kini masyarakatnya mulai beralih ke pembayaran digital akibat pandemi COVID-19. Transaksi fintech pembayaran pun melonjak. Tekanan pandemi secara tidak langsung telah mengubah kebiasaan konsumen menuju pembayaran cashless.

Terbatasnya interaksi dan aktivitas warga ditengah

pandemi serta lonjakan penambahan mitra penjual (merchant) telah mendorong transaksi melalui aplikasi yang sebagian besar menggunakan pembayaran secara digital. Transaksi yang meroket diantaranya untuk pembayaran e-commerce dan pesan-antar makanan.

Berkaca dari fenomena tersebut, tidak heran jika bank-bank besar mulai merambah model bisnis bank digital. Potensi untuk layanan bank digital masih sangat besar karena besarnya populasi nasabah kalangan milenial, pesatnya pertumbuhan kelas menengah, masifnya penetrasi

internet, serta kondisi pandemi yang membatasi pergerakan masyarakat.

Dari sisi operasional, model bisnis bank digital bisa menurunkan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) karena bank tidak lagi membutuhkan kantor cabang secara fisik dengan jumlah SDM yang banyak. Harapannya, efisiensi tersebut dapat menekan suku bunga pinjaman dan mendorong permintaan kredit.

Tidak hanya itu, kehadiran bank digital membawa hal positif bagi perekonomian, terutama

dalam memberi kemudahan masyarakat dalam bertransaksi. Pemanfaatan teknologi akan membuat transaksi semakin mudah dilakukan sehingga akan mendorong naiknya konsumsi domestik guna memulihkan roda perekonomian yang melambat akhir akhir ini. Bank digital juga bisa memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan untuk menganalisa kebutuhan nasabah dan pola konsumsinya.

Pada akhirnya bank digital berpotensi menjadi salah satu penggerak ekonomi, bisnis termasuk konsumsi rumah tangga. Bank digital bisa mengefisienkan proses transaksi dan penyaluran kredit.

Namun demikian, perhitungan dan analisa risiko tetap perlu dikedepankan. Akses credit scoring secara digital misalnya, akan mempercepat proses analisa kredit, tetap menjaga risiko tanpa mengorbankan kecepatan, akurasi dan efisiensi.



## RELAKSASI PAJAK DAN KREDIT BERPOTENSI GENJOT KONSUMSI DOMESTIK

Pemerintah melakukan berbagai cara demi menggerakkan konsumsi yang berujung pada pemulihan ekonomi nasional. Terbaru, pemerintah merilis kebijakan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor, dan pemberlakuan uang muka 0% untuk kredit kendaraan bermotor dan properti untuk semua jenis guna memacu sektor otomotif dan properti. Langkah ini strategis karena kedua sektor ini memiliki multiplier effect yang sangat besar, baik secara langsung maupun tidak langsung ke perekonomian nasional.

Adapun relaksasi PPnBM untuk sektor otomotif berlaku bagi kendaraan bermotor 1.500 cc ke bawah dengan komponen lokal 70%. Pemberian insentif berupa relaksasi PPnBM akan dilakukan secara bertahap selama 9 bulan, dimana masing-masing tahapan

akan berlangsung selama 3 bulan. Insentif PPnBM sebesar 100% dari tarif akan diberikan pada tahap pertama, lalu diikuti insentif PPnBM sebesar 50% dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua, dan insentif PPnBM 25% dari tarif akan diberikan pada tahap ketiga. Besaran insentif ini akan dilakukan evaluasi setiap 3 bulan. Instrumen kebijakan akan menggunakan PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang diberlakukan pada 1 Maret 2021.

Sementara untuk sektor properti, stimulus yang diberikan kepada masyarakat berlaku untuk semua properti, seperti rumah tapak, rumah susun (rusun), dan rumah toko (ruko). Pemerintah memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan rumah baru dengan nilai di bawah Rp 2 miliar.

Bukan hanya diskon pajak, kelonggaran juga diberikan dalam hal mencicil rumah. Mulai 1 Maret, masyarakat juga dapat membeli rumah dengan sistem Kredit Pemilikan Rumah tanpa uang muka atau down payment 0%. Ini sesuai dengan pelonggaran loan to value kredit properti hingga 100% yang dirilis BI pada bulan lalu. Hanya saja, tidak semua bank bisa memberikan uang muka nol persen. Hanya bank yang non performing loan (NPL) kurang dari 5%. Selain itu, pemerintah juga meminta bank-bank nasional merespons dengan cepat penurunan suku bunga acuan BI dengan melakukan penurunan bunga kredit agar permintaan kredit meningkat.

Dengan kondisi ini, prospek kredit pemilikan rumah (KPR) diyakini bisa meningkat. Sementara untuk rumah inden, prinsip kehati-hatian dan manajemen

risiko dikembalikan pada perbankan. Namun bukan berarti kebijakan ini tanpa kendala. Belum masifnya penurunan bunga kredit dapat menjadi hambatan bagi kedua program tersebut. Masih banyak bank nasional yang mematok bunga kredit tinggi bahkan hingga double digit. Belum lagi masalah kemudahan dalam pengajuan kredit.

Walau begitu, kebijakan ini disambut baik karena berguna untuk memperlebar dan mempermudah keterjangkauan dan daya beli. Upaya ini, bisa menambah omzet penjualan kendaraan bermotor dan properti yang sebagian besar dilakukan dengan fasilitas kredit.



**Webinar "Enhancing Performance And Sustainability Through Integrated GRC"**

PEFINDO Biro Kredit berpartisipasi sebagai narasumber pada webinar bertajuk Governance, Risk, and Compliance "Enhancing Performance and Sustainability Through Integrated GRC" yang diselenggarakan oleh PT Pegadaian (Persero) (04/03/2021). Pada kesempatan ini, Mohammad Mukhlis, Direktur PEFINDO Biro Kredit menjadi salah satu pembicara dengan materi seputar "Implementasi GRC di PEFINDO Biro Kredit dalam mendukung pertumbuhan usaha".

**Bincang Santai Idscore**

Bincang Santai Idscore (05/03/2021) dilaksanakan bersama Direktur Utama PEFINDO Biro Kredit (IdScore), Yohanes Arts Abimanyu dengan bintang tamu Teguh Wahyono selaku Direktur Teknologi & Informasi Digital PT Pegadaian (Persero) dengan tema "Dukungan Biro Kredit Terhadap Ekosistem Lembaga Keuangan Di Indonesia". Bincang Santai ini dipandu oleh Daryl Adam dan disiarkan live di akun Instagram @idscore.id dan @pegadaian\_id.



**Workshop Internal**

IdScore menyelenggarakan program workshop internal bertema "Revenue Enhancement through Marketing & Account Management" yang diikuti oleh anggota tim Marketing & Sales dan Account Management pada 16 – 17 Maret 2021. Program tersebut diharapkan dapat memicu kreativitas dalam melahirkan berbagai ide segar dan inovatif yang dalam melahirkan strategi guna mendukung aktivitas pemasaran dan layanan anggota.

**Webinar "Optimalisasi Big Data: Manfaatnya bagi Bisnis dan Pajak di Indonesia"**

PEFINDO Biro Kredit IdScore berpartisipasi sebagai narasumber pada webinar dengan tema "Optimalisasi Big Data: Manfaatnya bagi Bisnis dan Pajak di Indonesia" yang diselenggarakan oleh OnlinePajak (17/03/2021). Acara diisi beberapa narasumber terkemuka termasuk Yohanes Arts Abimanyu, Direktur Utama PEFINDO Biro Kredit IdScore yang menyampaikan materi seputar "Pemanfaatan big data dalam peningkatan mutu profil risiko bisnis".



**Webinar "Strengthening Organization Performance Through Information Security Management, IT Governance and Data Governance"**

PEFINDO Biro Kredit IdScore berpartisipasi sebagai narasumber dalam webinar "Strengthening Organization Performance Through Information Security Management, IT Governance and Data Governance" (24/03/2021). Webinar ini membahas bagaimana cara memperkuat suatu organisasi di era digital dari sudut pandang keamanan TI dan tata kelolanya serta aspek pengelolaan data dimasa berlimpahnya data seperti saat ini. Pada kesempatan tersebut IdScore menghadirkan beberapa eksekutif senior yang menyampaikan pemaparan mengenai tata kelola TI, keamanan informasi & manajemen jaminan TI serta tata kelola data.

**FGD bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)**

PEFINDO Biro Kredit Idscore bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyelenggarakan acara webinar guna mendiskusikan optimalisasi pemanfaatan credit scoring dalam mendukung manajemen risiko perusahaan pembiayaan (30/03/2021). Acara ini diikuti oleh sekitar 20 perusahaan pembiayaan anggota APPI.



PT PEFINDO Biro Kredit

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower 1 Lantai 1  
Jalan Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia  
Telp: +62 21 515 4501 Fax: +62 21 515 4503  
www.idscore.co.id  
info@pefindobirokredit.co.id

@IdScore\_Ind  
idscore.id  
IdScore  
IdScore  
IdScore Indonesia